

**KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI,
DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

Riska Dwi Fitriana*)

Nur Hidayati)**

M. Cholid Mawardi*)**

(Universitas Islam Malang)

E-mail : riska22021996@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the clarity of budget targets, accounting controls, and reporting systems on the accountability of the performance of Situbondo District government agencies. The data used in this study is primary data, the sample in this study is the SKPD and the head of the village government in Situbondo Regency. The sampling technique was carried out using purposive sampling method. The results obtained using multiple linear regression test $Y = 3,576 + 0,086 X_1 + 0,193 X_2 + 0,805 X_3$ and the test from this study using t test. The results of this study indicate that partially the Budget Target Clarity variable does not affect the Performance Accountability of Government Agencies. While the Accounting Control variables and reporting system have a positive effect on the Performance Accountability of Government Agencies.

Keywords: Budget Target Clarity, Accounting Control and reporting system

1. Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah kabupaten Situbondo adalah instansi yang mempunyai kewajiban untuk menerapkan hasil sistem akuntabilitas kinerja dan mempunyai kewajiban untuk melaporkannya. Dalam hal ini pejabat yang bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing, secara fungsional yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kemudian pimpinan instansi akan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas laporan yang telah disusun sebelumnya bersama tim kerja yang telah dibentuk. Dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2004 pasal 27 telah secara tegas dan jelas bahwa: pada ayat pertama petugas pemerintahan harus senantiasa menjalankan tugas dan kewajibannya. Kedua kepala daerah memiliki kewajiban menyajikan laporan mengenai penyelenggaraan semua kegiatan pemerintah daerah, laporan ini ditujukan untuk kepala pemerintah serta dilengkapi dengan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pengambilan Keputusan - Keputusan yang paling baik adalah tuntutan para manajer dalam sistem pengendalian akuntansi. Selain itu harus melakukan pengontrolan terhadap keefektifan operasi-operasi yang dilakukan, mampu

dalam menyusun estimasi biaya dan melakukannya, serta dapat menentukan tingkat profitabilitas keberhasilan dan ketika ada sebuah kasus mampu memilih alternatif terbaik untuk pemecahan masalah tersebut. Seorang manajer akan memilih Keputusan- Keputusan terbaik, merumuskan estimasi biaya dengan tepat, mengontrol operasi yang dilakukan dengan lebih efektif, dan melakukan estimasi mengenai profitabilitas yang ingin dicapai apabila menerapkan sistem pengendalian akuntansi dengan baik pula. Dengan demikian, perusahaan akan mampu meningkatkan kinerjanya, sehingga apabila manajer tersebut dihadapkan pada suatu masalah maka ia telah mempunyai solusi terbaik untuk masalah tersebut. (Nuraini, Indudewi, 2012:2). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ini diberi judul ***“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo”***.

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan diteliti antara lain :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?
2. Apakah pengendalian akuntansi mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?
3. Apakah sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk dapat memberikan informasi dan memberikan gambaran tentang akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Situbondo.
2. Bagi kalangan akademisi, dapat menjadi bahan referensi untuk keperluan studi dan untuk mempermudah peneliti selanjutnya.
3. Bagi instansi pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagai informasi dan koreksi bagi instansi Kabupaten Situbondo agar kedepannya menjadi lebih baik.

2.TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Zakiyudin dan Suyanto (2015) peneliti ini berjudul “kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI”. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Hidayatullah, Herdjiono (2015) peneliti ini berjudul “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Merauke. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Merauke”.

Tinjauan Teori

1. Anggaran

Siregar (2013:113) Anggaran induk merupakan rencana keuangan komprehensif dalam anggaran berbagai departemen dan aktivitas selama satu tahun. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Penyusunan anggaran operasional

- a) Anggaran penjualan adalah anggaran yang menjelaskan secara teliti tentang penjualan setiap beberapa jenis produk. Pada perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk, perkiraan penjualan harus dibuat untuk setiap jenis produk. Jika perusahaan menggunakan beberapa saluran distribusi, maka perkiraan penjualan harus dirinci, misalnya pedagang besar dan pengecer.
- b) Anggaran produksi adalah menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Sebelum dilakukan penyusunan anggaran produksi, perlu dipastikan bahwa pabrik mampu memproduksi sejumlah perkiraan penjualan. Produksi juga harus dijadwalkan pada tingkat yang efisien sehingga tidak terjadi fluktuasi kerja yang besar.
- c) Anggaran pembelian bahan baku merupakan salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu mengingat bahan sudah tersedia ketika diperlukan. Kuantitas bahan yang akan dibeli dan jadwal pengirimannya perlu ditentukan di awal. Biasanya perusahaan membuat kartu spesifikasi untuk setiap produk yang menunjukkan jenis dan kualitas bahan per unit produk.
- d) Anggaran *overhead* adalah menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Unsur-unsur *overhead* berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya *overhead* terdiri atas dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya *overhead* variabel adalah semua unsur biaya *overhead* yang jumlahnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Contoh biaya *overhead* variabel, yaitu perlengkapan, tenaga tidak langsung, dan utilitas pabrik. Biaya *overhead* tetap adalah semua unsur biaya *overhead* yang jumlahnya tetap meskipun terdapat perubahan aktivitas. Contoh

biaya *overhead* tetap, yaitu gaji penyelia, sewa pabrik, dan asuransi pabrik.

- e) Anggaran biaya pemasaran adalah menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Unsur biaya pemasaran, seperti biaya komisi penjualan, biaya transportasi dan perlengkapan akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan.
 - f) Anggaran biaya riset dan pengembangan adalah bertanggung jawab pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan.
 - g) Anggaran biaya administrasi adalah mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan serta anggaran biaya pemasaran. Biaya administrasi meliputi gaji staf, depresiasi gedung, peralatan kantor pusat, dan honor layanan hukum.
2. Penyusunan Anggaran Keuangan
- a. Anggaran kas adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas selama periode waktu tertentu.
 - b. Anggaran neraca adalah disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk.
 - c. Anggaran laporan arus kas adalah menyajikan perubahan kas dan setara kas (investasi jangka pendek yang sangat likuid) dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Seberapa jauh tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara spesifik dan jelas sehingga anggaran tersebut mudah dimengerti oleh penanggung jawab atas pencapaian anggaran merupakan penjelasan dari kejelasan sasaran anggaran. Anggaran pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan Pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengendalian Akuntansi

Instansi pemerintah dapat mengontrol seluruh aktivitas dan semua tanggung jawab melalui penerapan pengendalian akuntansi. Hal ini juga dapat menjadi penilai baik buruknya kegiatan yang telah dilakukan pemerintah, apakah kegiatan yang dilakukan ini telah sesuai, apakah biaya yang dikeluarkan efisien mungkin atau bahkan malah mengeluarkan biaya dengan berlebihan, serta apakah pelayanan yang diberikan instansi pemerintah sudah efektif dan baik kepada masyarakat.

4. Sistem Pelaporan

Pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengukur kinerja

yang dihasilkan selama periode tertentu, memonitor kerja serta dijadikan sebagai bahan pengevaluasian manajemen, dan lain-lain.

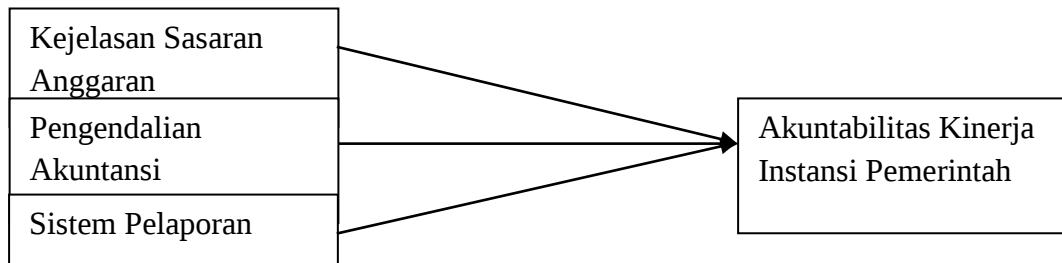
5. Akuntabilitas

Pihak-pihak yang berkepentingan sangat membutuhkan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial yang telah dilakukan. pemerintah baik daerah atau pusat. Pemenuhan publik berupa informasi adalah salah satu pemenuhan hak yang harus diberikan yaitu hak untuk mengetahui laporan tersebut, hak mendapatkan kesempatan mengeluarkan aspirasi adalah definisi dari akuntabilitas (Bastian, 2010:385).

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Inpres nomor 7 tahun 1999. “Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum politik”.

Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Melihat permasalahan, teori, dan kerangka konseptual. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Adanya pengaruh yang signifikan antara Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo.

H₂ : Adanya pengaruh yang signifikan antara Pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo.

H₃ : Adanya pengaruh yang signifikan antara Sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis peneliti ini tergolong sebagai peneliti kuantitatif yang menguji hipotesis. Berdasarkan tujuan penelitian ini tergolong penelitian korelasional. Penelitian ini lebih terfokus pada penggunaan kuesioner. Yang dinamakan penelitian primer Lokasi penelitian bertempat di satuan Kerja Perangkat Desa Daerah di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Juli.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan SKPD dan kabag. SKPD dan Kepala bagian pemerintah Kabupaten Situbondo. Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD dan Kepala bagian pemerintah Desa Kabupaten Situbondo.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang di dapat dari subjek data dan data ini merupakan data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara memberikan kuesioner kepada responden yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Peneliti menyusun pertanyaan yang diberi nilai dari poin 1 sampai poin 5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Regresi

Adapun model yang dihasilkan dalam regresi berganda disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.576	1.329		2.691	.009		
kejelasan_sasaran_anggaran	.086	.048	.118	1.783	.079	.808	1.238
pengendalian_akuntansi	.193	.066	.196	2.928	.004	.800	1.250
sistem_pelaporan	.805	.083	.689	9.749	.000	.715	1.399

a. Dependent Variable:
akuntabilitas_kinerja_instansi_pemerintah

Sumber: data primer yang diolah 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel di atas diketahui bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran signifikan sebesar 0,079 dan Pengendalian Akuntansi signifikan sebesar 0,004 dan Sistem Pelaporan signifikan sebesar 0,000. Sedangkan koefisien untuk variabel independen Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 0,086, dan koefisien untuk variabel independen Pengendalian Akuntansi (X2) sebesar 0,193 serta koefisien untuk variabel Sistem Pelaporan (X3) sebesar 0,805. dan konstanta 3,576 sehingga:

$$Y = 3,576 + 0,086 X1 + 0,193 X2 + 0,805 X3$$

2. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji data normalitas data yang digunakan adalah memakai uji *kolmogorov smirnov*. Adapun hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		kejelasan_sasaran_anggaran	pengendalian_akuntansi	sistem_pelaporan
N		81	81	81
Normal Parameters ^a	Mean	24.2716	16.9877	13.6667
	Std. Deviation	2.81519	2.07059	1.75357
Most Extreme Differences	Absolute	.121	.152	.168
	Positive	.114	.152	.153
	Negative	-.121	-.095	-.168
Kolmogorov-Smirnov Z		1.085	1.367	1.512
Asymp. Sig. (2-tailed)		.189	.048	.021
a. Test distribution is Normal.				

Pada tabel di atas diketahui bahwa diperoleh nilai K-S 1.085 dengan nilai signifikan sebesar K-S 0,189 untuk nilai variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), nilai sebesar K-S 1,367 dengan nilai signifikan K-S 0,048 untuk nilai variabel Pengendalian Akuntansi (X2), nilai K-S sebesar 1.512 dengan nilai signifikan sebesar K-S 0,021 untuk nilai variabel Sistem Pelaporan (X3). Pada kesempatan variabel tersebut terdapat nilai signifikansi >0,05 yang mengindikasikan bahwa pada variabel berdistribusi normal. Dengan demikian dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

3. Hasil Asumsi Klasik

3.1 Hasil Uji Multikolinieritas

Apabila nilai VIF sebesar $>10,00$ nilai *Tolerance* sebesar $<0,10$ maka terjadi multikolinieritas dan jika VIF sebesar $<10,00$ dan nilai *Tolerance* sebesar $>0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.576	1.329		2.691	.009		
kejelasan_sasaran_anggaran	.086	.048	.118	1.783	.079	.808	1.238
pengendalian_akuntansi	.193	.066	.196	2.928	.004	.800	1.250
sistem_pelaporan	.805	.083	.689	9.749	.000	.715	1.399

a. Dependent Variable:
akuntabilitas_kinerja_instansi_pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas tersebut dapat diketahui bahwa Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,238 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,808. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2) memiliki nilai VIF sebesar 1,250 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,800, Variabel Sistem Pelaporan (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,399 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,715. Dari ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai VIF kurang dari angka 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan *glejser* (Suliyanto, 2011, hal. 98) sebagaimana tabel di bawah ini:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.448	1.068		-.419	.676
kejelasan_sasaran_anggaran	.101	.037	.324	2.754	.070
pengendalian_akuntansi	.042	.055	.096	.767	.445
sistem_pelaporan	-.131	.074	-.230	-1.756	.083

a. Dependent Variable: ab_res

Berdasarkan hasil pengujian Heteroskedastisitas diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap absolut residual sebesar $0,07 > 0,05$, Signifikan Pengendalian Akuntansi terhadap absolut residual sebesar $0,445 > 0,05$ dan Signifikan Sistem Pelaporan terhadap absolut residual sebesar $0,083 > 0,05$.

3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson d Test* dengan Keputusan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.852 ^a	.725	.715	1.09438	1.810

a. Predictors: (Constant), sistem_pelaporan, kejelasan_sasaran_anggaran, pengendalian_akuntansi

b. Dependent Variable: akuntabilitas_kinerja_instansi_pemerintah

Sumber : data primer yang diolah spss 2018

Dari tabel *Durbin-Watson* dengan $n = 81$ dan $k = 3$ diperoleh diperoleh $dL = 1,5632$ dan $dU = 1,7164$. sedangkan hasil uji *Durbin-Watson* pada tabel 4.13 diperoleh nilai $DW = 1,810$ maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi.

4. Hasil Uji Hipotesis

4.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), dan Pengendalian Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) (Suliyanto, 2011, hal. 122). Adapun hasil uji statistik signifikansi simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	243.582	3	81.194	67.794	.000 ^a
	Residual	92.220	77	1.198		
	Total	335.802	80			

a. Predictors: (Constant), sistem_pelaporan, kejelasan_sasaran_anggaran, pengendalian_akuntansi

b. Dependent Variable: akuntabilitas_kinerja_instansi_pemerintah

Sumber : data primer yang diolah 2018

Berdasarkan hasil analisis di atas pada tabel 4.15 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Maka variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan variabel Pengendalian Akuntansi (X2) serta variabel Sistem Pelaporan (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.(Y)

4.2 Hasil Uji Koefisien *Adjusted R Square* (R^2)

Dalam penelitian ini digunakan untuk mencari derajat keeratan hubungan antara variabel independen yang terdiri dari Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Pengendalian Akuntansi (X2) dengan variabel dependen yakni Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Adapun hasil dari Uji Koefisien *Adjusted R Square* (R^2) dilihat pada tabel 4.16

Tabel 4.16
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.852 ^a	.725	.715	1.09438	1.810

a. Predictors: (Constant), sistem_pelaporan, kejelasan_sasaran_anggaran, pengendalian_akuntansi

b. Dependent Variable: akuntabilitas_kinerja_instansi_pemerintah

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,715. Sehingga pengaruh variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 71,5%. Sedangkan sisanya sebesar 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini (Suliyanto, 2011, hal. 132).

4.3 Hasil Uji t

Uji t disajikan dalam tabel 4.17 (Suliyanto, 2011, hal. 101)

Tabel 4.17
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.576	1.329		2.691	.009		
kejelasan_sasaran_anggaran	.086	.048	.118	1.783	.079	.808	1.238
pengendalian_akuntansi	.193	.066	.196	2.928	.004	.800	1.250
sistem_pelaporan	.805	.083	.689	9.749	.000	.715	1.399

a. Dependent Variable:

akuntabilitas_kinerja_instansi_pemerintah

Sumber : data primer yang diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.16 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.783 dengan tingkat signifikansi t sebesar $0,079 < 0,05$, maka H_{1a} ditolak. Sehingga disimpulkan secara parsial variabel Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya Kejelasan Sasaran Anggaran tidak dapat meningkatkan kinerja para perangkat desa hal ini dikarenakan kejelasan anggaran tidak diimplementasikan sesuai dengan anggaran yang telah disusun saat awal tahun.
2. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,298 dengan signifikansi t sebesar $0,004 < 0,05$ maka H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya Pengendalian Akuntansi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa sehingga para perangkat desa mempunyai semangat yang tinggi dalam mengabdikan kepada desa.
3. Variabel Sistem Pelaporan (X3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,749 dengan signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya Sistem Pelaporan yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa maka para perangkat desa merasa adanya keterbukaan sehingga mereka mempunyai semangat

yang tinggi dalam mengabdikan kepada desa dan senantiasa memperbaiki sikap dan tindakan mereka.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini:

- a. Dari pengujian secara simultan atau bersama-sama variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan variabel Pengendalian Akuntansi (X2) dan Sistem Pelaporan (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.(Y).
- b. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,783 dengan signifikansi t sebesar $0,079 < 0,05$, maka H_1 ditolak. Maka disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,928 dengan signifikansi t sebesar $0,004 < 0,05$ sehingga H_1 diterima. maka disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Variabel Sistem Pelaporan (X3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,749 dengan signifikansi t sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 diterima. maka disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti, namun dalam hal ini peneliti mengharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya terbatas pada pengambilan sampel yakni meliputi 3 desa yang ada di Kabupaten Situbondo.
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga Variabel saja yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.
3. Pengumpulan data penelitian yang menggunakan kuesioner sepertinya kurang efektif karena responden menjawab pertanyaan terkadang kurang serius dan kurangnya transparansi para perangkat desa dalam mengisi kuesioner tersebut

5.3

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian misalnya memperluas studi kasus bukan dalam lingkup 3 desa saja tapi semua desa yang ada di kabupaten Situbondo.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti tingkat pendidikan calon pegawai desa, motivasi dalam mengabdikan diri dan kepribadian yang dimiliki calon pegawai desa.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian lain seperti wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang telah diperoleh
- 4.

Daftar Pustaka

Hidayatullah, herdjiono, 2015, pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Merauke. Universitas Musamus Merauke

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Nuraini, Indudewi, D., I, 2012, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes. Jurnal Solusi Vo. 11 No. 4 Oktober 2012, h. 63-77. Semarang

Siregar, suripto, dkk, 2013, akuntansi manajemen. Jakarta Selatan 12610: salemba empat.

Suliyanto D, 2011, Ekonomertika Terapan. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

Zakiyudin, Suyanto, 2015, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015 hal 89-96 ISSN 2339-1545. Jakarta

*) Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

**) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

***) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA